

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KULTUR GLOBALISASI: INSPIRASI DARI KI HADJAR DEWANTARA

Bartolomeus Samho

| Department of Philosophy
Parahyangan Catholic University
Bandung, Indonesia

Abstract:

Education is a wide terminology describing among others the transformative and liberatif activities of human being. One of the major aims of an education programme is to make a more balanced growth of a person's characters, covering the intellectual, spiritual, social, emotional, and physical dimensions. In the light of Ki Hadjar Dewantara, the founder of *Tamansiswa* educational institution, one might say that education is an effort to advance the good characters (the inner strength and characters), the mind, and the body. For him, education is an effort to liberate the physical and spiritual aspects of a human being. Thus every activity in an education institution should be a process of humanisation that goes holistically, that is, physical, mental, spiritual, individual, sosial, cultural, dan natural growths. In line with this, a well educated person who has good characters may respect other people's rights and could develop ecological concern. This article aims to explore how far education institutions can respond within the range of Ki Hadjar Dewantara's concept of education to the globalization issues affecting our society today.

Keywords:

philosophy of education • globalization • character education • good characters • humanisation • holistic view • emancipation

Pendahuluan

Sebagai makhluk pembelajar, seperti ditegaskan ilmu antropologi, manusia mampu dan dapat belajar untuk mengenal dan meneruskan budaya leluhurnya kepada generasi muda.¹ Di sini pendidikan dipandang sebagai medan untuk memelihara nilai-nilai leluhur yang menjadi kompas kehidupan manusia dalam mengenal diri, sesama, lingkungan alam dan sosialnya. Perspektif demikian penting untuk masyarakat modern yang bercorak global. Melalui pendidikan, nilai-nilai leluhur terpelihara dan mental setiap pribadi para peserta didik dibentuk menjadi berkarakter positif sehingga mereka mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut teori fungsional,² peran pendidikan adalah meneruskan kebudayaan dan mempertahankan tatanan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan tentang berbagai peran agar dapat berfungsi efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini tampak bahwa yang menjadi tekanan teori fungsional adalah akibat lebih lanjut dari aktivitas pendidikan, yakni kontribusi positif para peserta didik dalam kehidupan sosialnya setelah menempuh pendidikan formal. Harapan demikian tentu mengisyaratkan pentingnya lembaga pendidikan menjadi arena pembelajaran yang holistik dalam membangun berkarakter positif para peserta didik. Hanya dengan demikian, mereka mampu meneruskan kebudayaan dan tatanan sosial dan berperilaku konstruktif dalam masyarakat.

Ditelisik dari sudut pandang filsafat, pendidikan pada umumnya dipahami sebagai upaya menyasati dan menjawab persoalan-persoalan mendasar manusia sebagai makhluk multidimensional. Filsafat pendidikan idealisme, misalnya, memaknai pendidikan formal dan informal sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat serta kemampuan sosial para peserta didik.³ Dengan demikian, mereka mampu menjalani kehidupan personalnya secara bertanggungjawab dalam konteks sosialnya. Sementara filsafat pendidikan realisme lebih menekankan aspek penyesuaian hidup dan tanggungjawab sosial para peserta didik sebagai tujuannya.⁴ Dalam nuansa yang lain, filsafat pendidikan materialisme memandang tujuan pendidikan lebih pada upaya untuk perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya, membentuk tanggungjawab hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Dalam

konteks itu, peran pendidik adalah merancang dan mengontrol proses pendidikan.⁵ Dari kubu yang lain lagi, filsafat pendidikan pragmatisme, memandang tujuan pendidikan sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan hidup manusia, sarana untuk pertumbuhan hidup, dan cara yang ditempuh untuk membimbing anak yang belum dewasa kepribadiannya berdasarkan struktur atau nilai-nilai sosialnya.⁶ Tentu masih banyak aliran-aliran filsafat pendidikan lainnya yang memiliki konsep spesifik tentang pendidikan, yang tidak mungkin disinggung secara serentak di sini, misalnya filsafat pendidikan eksistensialisme, progresivisme, perenialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Tetapi cukup beralasan bila kita meyakini bahwa aliran-aliran filsafat pendidikan pada umumnya berupaya menelisik aspek tertentu dari kegiatan pendidikan dan manusia adalah titik sentuh utamanya.

Dalam konteks pendidikan karakter, pendidikan mestilah mampu mengintegrasikan keutuhan antara unsur mental dan fisik para subjeknya agar mereka berkembang sebagai pribadi yang utuh.⁷ Prosesnya haruslah *humanum*. Oleh karena itu, pendidikan penting berlandaskan pada sumber-sumber nilai (agama, filsafat, budaya, dan moral) dan bertolak dari prinsip-prinsip yang mencerminkan keyakinan mendasar tentang manusia dan kebutuhannya: pendidikan sepanjang hayat, keteladanan, keterbukaan, kesetaraan peran, tanggungjawab dan kualitas.⁸ Dengan demikian, pendidikan sungguh menjadi medan pertumbuhan karakter positif seseorang sehingga dia menyadari keluhuran martabatnya (beradab dan berkesadaran tinggi akan kemanusiaan global).

Pribadi yang berkarakter positif mestilah berkesadaran tinggi akan pentingnya menjalani kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban. Dalam konteks filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara, pribadi yang memiliki karakter positif (berbudi pekerti) adalah pribadi yang mampu mengenal kodrat dirinya, menghormati dirinya, menghargai sesama dan hak-haknya, serta menghormati kelestarian alam. Dalam kerangka membangun pribadi yang berkarakter positif itulah ia merumuskan semboyan, metode, dan asas-asas pendidikannya yang menampilkan kekhasan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Dalam praksisnya, sang pendidik (pamong) adalah teladan yang menunjukkan ideal pribadi yang berkarakter positif. Keteladanan pendidik adalah kompas yang menuntun para peserta didik dalam menjalani kehidupan personal dan sosialnya di kemudian hari

sebagai insan yang beriman, berintegritas, dan bermoral. Begitulah sosok pribadi yang berprikemanusiaan.

Meskipun konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara bercorak ke-Indonesiaan dan selalu relevan untuk pendidikan karakter di Indonesia, tetapi kita dapat melihat dan menafsirkan konteks Indonesia dalam kultur globalisasi dewasa ini. Setelah hampir genap sudah tujuh dasawarsa usia kemerdekaan Indonesia, tanpa bermaksud menyangkal adanya perkembangan pembangunan dalam berbagai ranah kehidupan, negeri Pancasila ini tetap rawan terhadap persoalan-persoalan eksistensial, yang dengan sendirinya menunjukkan kelemahan pendidikan dalam membentuk karakter manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia memang telah “berkembang,” tapi praksis hidup berbangsa dan bernegara masih rentan terhadap kekerasan, perilaku koruptif, dan eksploitasi lingkungan hidup. Fenomena tersebut menunjukkan nilai-nilai warisan leluhur tidak lagi menjadi ruh kehidupan personal dan sosial bangsa Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi informasi dan sarana transportasi yang membantu manusia di Indonesia dalam segala aspek kehidupannya bisa jadi membuat sebagian besar orang Indonesia tercerabut dari akar nilai-nilai tradisional leluhurnya. Kini kita dapat menyaksikan bahwa porsi penyiaran seputar penyakit-penyakit sosial tersebut di media masa (elektronik dan nonelektronik) kian meningkat. *Kekerasan* (fisik dan verbal) terhadap sesama (kekerasan seksual, penipuan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa, penganiayaan guru terhadap muridnya, majikan terhadap asisten rumah tangganya, konflik sosial-horisontal berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan),⁹ fenomena *korupsi* bergrombolan secara sistemik yang merugikan negara dan rakyat banyak,¹⁰ dan alih fungsi hutan yang mengakibatkan *rusaknya lingkungan hidup*.¹¹ Persoalan-persoalan di atas boleh jadi akibat orang terseret arus globalisasi dan tercerabut dari akar nilai-nilai tradisional leluhurnya.

Perspektif Globalisasi dan Tantangannya

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini sungguh signifikan dalam menjawab kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Jarak yang bermil-mil jauhnya, yang dulu memasung ruang gerak manusia, kini tidak lagi menjadi persoalan dan kendala berarti bagi dinamika kehidupan

manusia modern. Fakta yang tak terbantahkan kini adalah sirnanya batas-batas kehidupan personal dan sosial (teritorial, negara, bangsa, kesukuan, kepercayaan, politik, kebudayaan) yang tempo dulu memasung ruang gerak manusia atau menghambat interaksinya secara global.¹² Masyarakat dunia dewasa ini dengan begitu luasnya berkomunikasi dan berinteraksi, bertemu dan menjalin relasi dalam jejaring sosial tanpa batas. Mengikuti Marshall McLuhan, teknologi informasi kini menjelma menjadi dunia tanpa dinding pembatas. Barangkali begitulah kita memahami konsep “globalisasi.” Ia adalah fakta di mana “masyarakat melebur tanpa batas-batas,” menjadi suatu keseluruhan yang mengorganisir diri, dan kita menjadi bagiannya. Masyarakat yang demikian bercorak multidimensionalitas dan kompleksitas.¹³

Konteks dunia yang mengglobal dan sifatnya yang terbuka dan nyaris tak berjarak berkat kecanggihan teknologi informasi dewasa ini mewujud dalam berbagai macam jenis media komunikasi. Kata Marshall McLuhan, seperti diikuti oleh Hikmat Budiman, telepon adalah pembicaraan tanpa dinding; fonograf adalah gudang pertunjukan musik tanpa dinding; fotografi adalah museum tanpa dinding; cahaya listrik adalah ruang tanpa dinding, film, radio, TV dan jaringan internet adalah ruang kelas tanpa dinding. Melalui internet, misalnya, bayangan tentang kesatuan dalam komunitas bersama a la Benedict Anderson terasa tidak relevan.¹⁴

Kini berbagai macam jejaring sosial telah membentuk dunia virtual, sebuah “dunia yang serba cair dan longgar, dunia yang lolos dari lapisan-lapisan ketat berupa negara-bangsa.” Dalam dunia “virtual” manusia didaulat menjadi subjek bebas. Dengan demikian, dia leluasa untuk menciptakan “pertemuan hasrat-hasrat” dalam berbagai corak, tujuan, dan manfaatnya. Relasi antarmanusia pun tidak lagi terkotak-kotak secara kaku oleh, misalnya, konsep bangsa, suku, agama, ras, daerah dan ideologi tertentu. Dalam istilah Marshall McLuhan, teknologi informasi telah mengubah dunia manusia menjadi bagaikan “kampung global,”¹⁵ wahana di mana setiap orang dapat bertukar cerita, berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup menyangkut banyak hal secara instan, efisien dan efektif. Dinding-dinding pembatas lama seperti ideologi politik, geografis, agama, dan nasionalitas kian memudar. Dewasa ini manusia bisa “bertemu” melalui mesin-mesin cerdas seperti komputer personal multimedia yang mampu menyatukan tampilan fisiknya dengan telegraf, surat kabar,

telepon, faximili, radio, answering machine, TV, video, dan lain-lain, yang memang signifikan untuk kemajuan taraf kehidupan.

Namun, ancamannya yang nyata adalah manusia tercerabut dari akar budayanya. Di Indonesia, misalnya, orang begitu mudah mengikuti nilai-nilai dari luar yang mencerminkan liberalisasi cara hidup pribadi ketimbang hidup selaras dengan nilai-nilai tradisional leluhurnya, budaya lokal, atau budaya bangsa yang dikristalisasi sebagai Pancasila. Fenomena-fenomena seperti: free sex, tawuran antarpelajar, pembocoran kunci jawaban Ujian Nasional, korupsi, konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), tindakan-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa pendidikan karakter masih merupakan mega proyek bangsa yang berideologi Pancasila ini.

Tanpa mengabaikan kemudahan dan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, yang memang berguna bagi kemajuan dalam praksis pendidikan dan berbagai bidang kehidupan manusia, ia juga menyimpan bermacam corak dan jenis ancaman bagi kehidupan manusia, khususnya untuk urusan pembentukan karakter positif. Setidaknya ada enam tantangan globalisasi yang menjadi alasan bagi urgensi pendidikan karakter, yakni:

Pertama, relativisme nilai dan liberalisasi cara hidup sehingga orang tergiring pada desakralisasi kehidupan. Apa yang dianggap bermakna dan sakral dalam tatanan nilai-nilai tradisional lantas dianggap irasional dan ketinggalan jaman. Kondisi ini semakin parah ketika klaim kebenaran mutlak atas nilai-nilai tradisional kian melemah. *Kedua*, anak-anak remaja dan orang-orang dewasa banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan tanpa batas. Kebebasan seksual dengan segala implikasi negatifnya; penyakit kelamin, HIV, AIDS, dan seterusnya., menjadi perkara serius yang kian sulit diatasi. *Ketiga*, masing-masing individu menjalani kehidupan dengan berpusat pada klaim atas hak privat. Perspektif atas kebahagiaan pribadi pun lantas dimaknai secara dangkal sebab disamakan dengan hak atas kebebasan mencari kenikmatan sejauh tidak mengganggu hak orang lain. *Keempat*, kecenderungan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan hasratnya dengan budaya instan. Apa yang diinginkan harus langsung dipenuhi. Orang pun kian tidak lagi bisa sabar menunggu proses sehingga mudah berprinsip “bisa berarti boleh.” Akibatnya, orang mudah mengalami frustrasi karena lebih tunduk pada atau hidup seturut keinginan dan dorongan hasrat ego dari pada hidup berdasarkan

kebutuhan real. *Kelima*, kehidupan individu yang terjerat dalam kultur privatisasi dan liberalisasi cenderung anti terhadap komitmen. Ini jelas berlawanan dengan nilai-nilai tradisional, juga nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keimanan, persaudaraan, kesetiaan, kekeluargaan, dan solidaritas. *Keenam*, “krisis komunikasi secara langsung dan terbuka” antara para orang tua dengan anak-anaknya atau antara para guru dengan para peserta didiknya.¹⁶ Kemampuan para orang tua dan para guru untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka bisa diibaratkan dengan ombak laut, kadang-kadang datang dan pergi begitu saja. Anak-anak kini malahan lebih sering berkomunikasi dengan pihak lain dalam dunia maya. Mereka berkomunikasi dan menjalin relasi dengan dan terpengaruh oleh orang lain yang bahkan belum pernah dijumpainya dalam kehidupan real, misalnya, berkomunikasi melalui *facebook*, *twitter*, *e-mail*, *homepage*, dan lain-lain.

Keenam fenomena di atas berpotensi menjadi akar krisis multidimensional: Krisis keimanan dan toleransi, krisis rasa persaudaraan dan rasa kemanusiaan, krisis nasionalisme, krisis musyawarah, krisis keadilan dan kepedulian terhadap sesama, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis ekologi, dan seterusnya. Situasi krisis ini berpeluang melahirkan manusia-manusia yang egois, individualis, dan serakah. Puncaknya adalah perendahan martabat dan kehidupan manusia dan eksploitasi alam.

Mengartikulasi Pendidikan Karakter

Pendidikan selalu bersentuhan dengan praksis emansipasi dan humanisasi manusia sebagai ciri khasnya. Dalam perspektif itu, upaya pendidikan mestilah menyangkut totalitas manusia secara personal (lahiriah dan batiniah), dalam kerangka menyiasati ruang kehidupannya dalam konteks sosial, kultural, dan global. Prinsip yang melandasinya adalah keyakinan akan manusia sebagai makhluk pembelajar. Corak dan tuntutan dalam praksisnya adalah holistik dan integratif (keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dan jejaring berbabagi macam disiplin ilmu dalam rangka pemanusiaan manusia secara manusiawi).

Sebagai upaya pemanusiaan, praksis pendidikan (formal) adalah terencana dan terarah untuk membangun keutuhan manusia sebagai subjek. Dalam kerangka itu, aktivitasnya bercorak pemberdayaan, penyadaran, dan pembebasan manusia. Pemberdayaan menyangkut upaya optimal yang melibatkan para peserta didik secara sadar dan bertanggungjawab dalam

pengolahan potensi-potensi dirinya. Sementara kesadaran menyangkut upaya membangun kesadaran para peserta didik akan pentingnya peran serta mereka dalam mengaktualisasi potensi-potensi dirinya dan dalam kehidupan sosial. Sementara pembebasan menyangkut upaya pembentukan karakter positif para peserta didik sehingga mereka berkepribadian dewasa (berbudi pekerti luhur) dan terbebaskan dari kecenderungan diri yang dehumanistik dan destruktif terhadap sesama dan lingkungan hidup.

Berbagai tantangan kehidupan yang bertaut erat dengan kultur globalisasi di atas perlu direspon lembaga pendidikan, negeri dan swasta, dengan mengoptimalkan pembentukan karakter positif para peserta didik dalam prosesnya. Pendidikan karakter, mengikuti konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, adalah upaya pendidikan untuk memajukan bertumbuhnya karakter positif, yakni: kekuatan dan kehalusan batin, karakter teguh, pikiran (intelektual) dan tubuh para peserta didik. Pendidikan karakter ini penting bagi para peserta didik agar mereka dapat merengkuh kesempurnaan hidup dan dapat merajut keselarasan hidupnya dengan dunianya.¹⁷ Artinya, pendidikan karakter mestilah bercorak transformatif dalam arti membebaskan manusia dari potensi jahat yang ada pada dirinya dan memang dapat dilynepkan, atau setidaknya-tidaknya dapat menutupi, mengurangi tabiat-tabiat jahat yang tidak dapat dilynepkan sama sekali (tabiat biologis) karena sudah bersatu dengan jiwa manusia.¹⁸ Dalam kerangka pendidikan karakter itu, keteladanan para pendidik dalam bertutur kata dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari adalah modal utama dan mendasar. Merekalah yang menuntun dan menjadi model bagi para peserta didik dalam berperilaku sehari-hari. Berkat meneladani para pendidiknya, para peserta didik mampu menjalani kehidupannya secara berkeadaban dan tidak bertindak menurut dorongan instingtif saja, tapi bertindak atas dasar dorongan akal budi dan pertimbangan hati nurani. Maka, praksis pendidikan karakter selain membutuhkan teladan, juga haruslah manusiawi. Itulah sebabnya, pendidikan Belanda yang bersifat *regering, tucht, orde* (perintah, hukuman dan ketertiban) pada masa penjajahan dulu ditolak oleh Ki Hadjar Dewantara karena dipandang tidak cocok untuk bangsa Indonesia dan berpotensi merusak pertumbuhan karakter positif kaum bumi putra para sebab mereka selalu hidup di bawah paksaan/tekanan.

Dalam keyakinan Ki Hadjar Dewantara, insan terdidik mestilah berkarakter baik sehingga perkataan dan tindakannya berkualitas sabar, tawakal, arif dan bersahaja. Insan yang berkarakter baik mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam perkataan dan tindakannya tanpa menyakiti hati dan perasaan sesame (perilakunya santun, tidak berbicara sembarangan, mampu bertenggang rasa, dan tidak menyudutkan orang lain dalam pergaulan). Dengan kata lain, orang yang berkarakter positif selalu berpikir sebelum bertindak, sopan dalam mengajukan gagasan dan usulan, mengutarakan hal-hal yang pantas didengar, dan melakukan perkara-perkara yang benar dan baik bagi kehidupan sesame. Hal itu hanya mungkin karena proses pendidikan yang mengintegrasikan secara utuh antara budi (pikiran) dan pekerti (tenaga) sehingga ada keterjalinan erat antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan seseorang. Itulah yang membuat seseorang mampu bertindak secara selaras dengan nilai-nilai dan mampu berelasi harmonis dengan lingkungannya. Namun, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter dalam praksis?

Mengikuti pandangan Ki Hadjar Dewantara, praksis pendidikan karakter mesti berdasarkan alat-alat pendidikan yang menumbuhkan kesadaran akan kemanusiaan dirinya, yakni: *pertama*, pemberian contoh. Dalam praksis pendidikan, para pendidik memberikan contoh dalam tindakan dan perkataan yang positif kepada para peserta didiknya. *Kedua*, pembiasaan. Para pendidik membiasakan diri hidup dalam kerangka nilai-nilai dan menuntun para peserta didiknya untuk hidup dalam kerangka nilai-nilai itu. *Ketiga*, pengajaran. Para pendidik memberikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan pembangunan karakter positif. *Keempat*, perintah, paksaan, dan hukuman. Para peserta didik hanya memberikan perintah, paksaan dan hukuman hanya kalau dipandang perlu dan penting untuk mencegah para peserta didik menyalahgunakan kebebasannya dan melakukan kesalahan yang merugikan dirinya dan sesame. *Kelima*, perilaku. Para pendidik dituntut untuk menunjukkan tindakan yang baik dan benar dalam kehidupannya sehari-hari sehingga pantas menjadi model bagi dan diteladani oleh para peserta didiknya. *Keenam*, pengalaman lahir dan batin (*nglakoni, ngrasa*). Artinya, para peserta didik diberikan kepercayaan untuk mengerjakan secara langsung tugas-tugas mereka secara bertanggungjawab agar mereka sungguh merasakan dan mengalaminya sebagai bagian dari keutuhan dirinya. Menurut Ki

Hadjar Dewantara, keenam cara pendidikan karakter itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan umur peserta didik.

Keenam cara pembentukan karakter positif di atas memungkinkan para peserta didik untuk mencapai kedewasaan kepribadian. Itulah yang membuat mereka kelak mampu menjadi pribadi yang merdeka. Artinya, pribadi yang terbebaskan dari kecenderungan rendah diri; pribadi yang mampu menjalani hidupnya secara mandiri dan beradab. Menurut Ki Hadjar Dewantara pribadi merdeka itu memiliki tiga ciri utama, yakni: *Pertama*, dapat berdiri sendiri (*zelfstandig*): memiliki kedaulatan diri, kemerdekaan diri (lahiriah dan batiniah), tapi kemerdekaan diri ini terbatas dengan kemerdekaan orang lain (masyarakat). *Kedua*, tidak tergantung kepada orang lain (*onafhankelijk*): memiliki kemandirian, prinsip, dan tanggungjawab sehingga mampu menentukan dan memutuskan pilihan hidup dan tindakan yang tepat dalam kerangka hidup bersama. *Ketiga*, dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking*): mampu menguasai diri, menunaikan kewajiban-kewajiban, memiliki kesadaran akan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup sehingga pikiran, perasaan, dan tindakannya selaras dengan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bersama; tidak merugikan sesama dan tidak merusak lingkungan hidup bersama.¹⁹

Kedewasaan karakter membebaskan orang dari penjara egoisme diri yang pongah dan serakah. Sebaliknya, ketidakdewasaan dalam karakter berpotensi menggiring orang pada tindakan yang merendahkan harkat dan martabat diri dan sesama: pelecehan seksual, *human trafficking*, kekerasan terhadap sesama, korupsi, dan eksploitasi lingkungan hidup.

Landasan Nilai Pendidikan Karakter

Ki Hadjar Dewantara selalu memandang pendidikan sebagai upaya pemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia. Itulah sebabnya Bapak Pendidikan Nasional bangsa Indonesia itu meletakkan kerangka pendidikan karakternya pada asas-asas yang disebut Pancadharmas (asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan kemanusiaan). Kelima asas itu mengisyaratkan agar pendidikan menyadarkan manusia akan kodrat dirinya yang tunduk pada hukum alam, pentingnya menghargai kemerdekaan orang lain, meneruskan budaya leluhur dan hidup selaras dengan nilai-nilainya, menyokong atau berpartisipasi aktif dalam menjaga kesatuan bangsa, serta menjadi saudara bagi siapapun juga sebagai manusia di seantero dunia ini.

Praksis pendidikan karakter berdasarkan asas-asas itu tentu harus mencerminkan nilai-nilai Keindonesiaan seperti Ketuhanan, persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong, musyawarah dan mufakat, serta hormat pada hak-hak sesama. Secara lengkap barangkali itulah yang dikristalisasi sebagai Pancasila. Singkatnya, ruh pendidikan karakter mesti menampilkan kekhasan kultur dan keunikan Indonesia. Dalam konteks itu, asas-asas dan semboyan pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang pada intinya menyangkut kemanusiaan dan manusia yang harus berperikemanusiaan dan beradab dalam konteks kehidupan personal dan komunal, nasional dan internasional penting dihidupkan. Oleh karena itu, landasan nilai bagi pendidikan karakter di Indonesia mestilah berangkat dari konsep dan melanjutkan perjuangan Ki Hadjar Dewantara itu. Dalam kerangka itu, pendidikan karakter di Indonesia dalam praksisnya mesti berangkat dari pokok-pokok berikut.

Pertama, berlandaskan ketaqwaan dan toleransi. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara vertikal mencerminkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya pada Tuhan. Tapi secara horizontal mengharuskan manusia di Indonesia untuk menghormati keragaman cara ber-Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan.²⁰ Dalam praksis hidup bersama, pluralitas yang dimaksudkan menuntut masing-masing pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara historis ajakan untuk saling menghormati itu berlandaskan pada aneka ragam pernyataan Bung Karno yang bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya pada Tuhan atau ber-Tuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati cara dalam ber-Tuhan.²¹ Kedewasaan iman kepada Tuhan adalah ruh yang menghidupkan sikap toleransi dalam beragama; yang juga mendorong dan menggerakkan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidupnya.

Kedua, dimaksudkan untuk memupuk rasa persaudaraan atas dasar hormat pada kemanusiaan. Iman kita kepada Tuhan menjadi nyata memuliakan diri-Nya melalui sikap dan tindakan konkret kita terhadap sesama manusia yang konstruktif. Jadi, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mendukung dan mengharuskan kita untuk menghormati kemanusiaan

orang lain; hidup bersaudara dengan siapapun juga dan hormat terhadap martabat kehidupan manusia. Implementasi iman seperti itu menghantar setiap orang (Indonesia) kepada kondisi hidup yang adil dan beradab. Dengan demikian, kecenderungan pada tindak yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan berupa kekerasan dalam berbagai bentuk dan alasannya dapat dikurangi.

Ketiga, menumbuhkan sikap rela berkorban atas dasar komitmen dan cinta pada tanah air. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti bahwa, kecenderungan untuk korupsi dan sikap primordial berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan yang menghambat pembangunan dan memperlemah persatuan bangsa, dan membuyarkan kebersamaan dalam keragaman perlu ditinggalkan.

Keempat, menegaskan pentingnya musyawarah untuk menentukan dan mengambil keputusan bersama. Kemauan untuk bermusyawarah dan sikap rela berkorban mencitrakan sosok manusia yang bijaksana, yang sanggup meninggalkan egoisme dirinya dan terbuka hati dan budinya untuk mendengarkan pandangan pihak lain dan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan yang berguna untuk mencapai cita-cita hidup bersama.

Kelima, membangun solidaritas sosial berupa kepedulian dan keterlibatan sosial secara aktif (berbelarasa) untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak manusiawi karena kemiskinan. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbelarasa kepada sesamanya yang menderita.

Berdasarkan pokok-pokok di atas, tampak bahwa pendidikan karakter dalam praksis adalah upaya untuk “membebaskan” para peserta didik dari sikap picik dan egois sehingga mereka mau maju bersama dalam rangka menjawab tantangan-tantangan kultur globalisasi secara konstruktif bagi diri sendiri, sesama dan lingkungan.

Strategi Pendidikan Karakter

Deskripsi mengenai pendidikan karakter dalam praksis di atas mengisyaratkan pentingnya sebuah strategi. Pendidikan sebagai upaya pemanusiaan manusia dalam kerangka membangun karakter positif mestilah berlandaskan sikap saling percaya antara pendidik dan para

peserta didik dan relasi yang setara di antara mereka. Dalam konteks itu, strategi pendidikan karakter yang berpotensi menumbuhkan kedewasaan seseorang adalah menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan (manusia bebas dan merdeka).

Dalam konteks para peserta didik sebagai subjek pendidikan, metode pendidikan karakter yang sepadan untuk pembastinan nilai-nilai yang dipaparkan di atas adalah metode *Among*.²² Secara umum istilah *among* dipahami sebagai upaya mengasuh. Dalam praksisnya para pendidik (pamong) bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi nyaman, aman, damai bagi para peserta didik. Dengan demikian, dalam diri para peserta didik tumbuh rasa percaya kepada para pendidik. Di sini pendidikan dan pengajaran dalam konteks pendidikan karakter dimaknai sebagai kegiatan pemerdekaan batin, pikiran, dan daya para peserta didik.²³ Dalam perspektif yang luas, mengemong anak berarti memberi kebebasan kepada anak untuk bergerak menurut kemauannya. Tetapi pamong akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan, apabila ekspresi kebebasan anak akan membahayakan keselamatannya, mengganggu ketenraman hidup orang lain, dan merugikan hak-hak sesama. Memberikan kebebasan kepada anak untuk bertindak dalam konteks mengembong bertujuan untuk melatih anak untuk bertanggungjawab terhadap akibat kebebasannya.

Mengikuti filosofi Ki Hadjar Dewantara, praksis pendidikan karakter dengan metode “*among*” tentulah berlandaskan semboyan yang bercorak Keindonesiaan, yakni: *Pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha*. Semboyan ini dengan mudah kita pahami sebagai keharusan bagi seorang pendidik untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan bagi para peserta didiknya. Pendidik (pamong) wajib menjadi pemimpin bagi para peserta didiknya. Dalam konteks itu, niat, ucapan dan tindakan seorang pendidik harus menginspirasi para peserta didiknya akan pentingnya hidup dalam kerangka nilai-nilai yang menjadi patokan kehidupan konkret yang wajar dan bermartabat. *Kedua, Ing Madya Mangun Karsa*: Pendidik dipahami sebagai sosok yang berkarya di tengah murid-muridnya, menginspirasi dan menggerakkan mereka untuk maju dan berkembang dalam aspek kehidupan, menumbuhkan gagasan, membangkitkan kehendak, niat, dan keinginan untuk berkarya yang berdayaguna bagi perwujudan kondisi hidup bersama yang baik. Singkatnya, pendidik adalah sosok yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus memprakarsai,

memotivasi, dan menginspirasi peserta didiknya untuk berkehendak yang baik, jujur, dan adil dalam kehidupan nyata. *Ketiga, Tut Wuri Handayani*: Pendidik adalah orang yang senantiasa memberi dorongan, dukungan dan topangan kepada para muridnya agar bertindak berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bersama dan mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam karya nyata yang penting bagi masyarakat. Pendidik mengikuti para muridnya dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak dan memengaruhi mereka dengan kekuatannya untuk menghadirkan ketenraman lahir-batin bagi sesama. Bahkan pendidik dapat bertindak “memaksa” para peserta didiknya untuk kembali berkomitmen pada nilai-nilai dan aturan-aturan manakala ia melihat dan mengetahui tindakan para peserta didiknya menyeleweng dari nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bersama sehingga berpotensi membahayakan hidupnya,²⁴ dan membahayakan kehidupan sesama.

Citra Pribadi yang Berkarakter Positif

Strategi pendidikan karakter di atas tentu bertujuan untuk membentuk kepribadian para peserta didik yang dewasa atau berkarakter positif. Secara umum, pribadi yang berkarakter positif adalah pribadi yang terbebaskan dari segala dorongan dehumanistik dan destruktif sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya atau menjadi pribadi yang mandiri. Dalam perspektif itu pula, sosok pribadi yang berkarakter positif adalah:

Pertama, memiliki ketetapan pikiran dan batin. Dalam istilah Ki Hadjar Dewantara, pribadi yang berkarakter positif setia pada nilai-nilai dan hidup selaras dengan nilai-nilai. Itulah yang dimaksudkannya dengan kondisi pribadi yang “*tetep, antep, dan mantep.*” Jika seseorang sudah dalam kondisi itu, ia pasti memiliki komitmen yang kuat untuk menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bersama.

Kedua, memiliki rasa percaya diri, pendirian yang kukuh, keberanian yang tawakal, dan kekuatan mental (*ngandel, kandel, kendel, dan bandel*). Artinya, pendidikan karakter itu membentuk rasa percaya (*ngandel*) yang akan memberikan pendirian yang kukuh (*kandel*) pada seseorang sehingga ia menjadi pribadi yang berani (*kendel*) dan tawakal, tidak lekas ketakutan (*bandel*).

Ketiga, memiliki kesucian pikiran dan batin, ketenangan hati, penguasaan diri, dan kemenangan atas egoisme diri (*neng, ning, nung, dan nang*).²⁵ Secara

umum, pribadi yang menjalani pendidikan karakter secara serius dan selaras dengan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bersama, memiliki kesucian pikiran dan batin, ketenangan hati, penguasaan diri, dan kemenangan atas egoisme dirinya. Dengan demikian, ia mampu menghargai Tuhan, sesama, dan alam semesta.

Penutup

Kecakapan seseorang berpotensi menuntunnya ke puncak keberhasilan dalam hidupnya, tetapi diperlukan karakter positif untuk mempertahankannya. Itulah sebabnya lembaga pendidikan perlu merancang model pendidikan yang memungkinkan para peserta didik untuk memiliki kesadaran akan pentingnya membangun hidup yang berkualitas, yakni: hidup yang berdasarkan atas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; hidup dalam kasih dan persaudaraan (dan mampu menjalin kerjasama dengan sesama); hidup yang mencerminkan rasa cinta pada tanah air (cinta pada lingkungan hidup); hidup yang diwarnai oleh kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang penting untuk kehidupan bersama; hidup yang berbelarasa kepada sesama yang menderita atau selalu tergerak hati oleh rasa iba untuk berbuat nyata demi membebaskan sesama dari kondisi hidup yang tidak manusiawi; dan hidup yang peduli pada kelestarian lingkungan alam.

Dalam kerangka pendidikan karakter, beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan lembaga pendidikan, yakni: *Pertama*, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan penuh kasih sayang; terjaminnya rasa aman, nyaman, baik bagi para pendidik maupun bagi para peserta didik di sekolah. *Kedua*, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peserta didik untuk belajar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan aturan hidup bersama. *Ketiga*, mengimbau para pendidik untuk menjadikan dirinya sebagai model (teladan) dalam upaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan menaati aturan-aturan hidup bersama. *Keempat*, berperan aktif dalam upaya mendorong dan mendampingi peserta didik untuk berkembang tahap demi tahap dalam mengimplementasi nilai-nilai dan aturan-aturan hidup sesuai dengan tingkat perkembangannya. *Kelima*, meneguhkan peserta didik yang melakukan suatu tindakan yang bernilai atau baik, dan mendorongnya untuk selalu mencoba melakukan hal-hal yang bernilai, serta memujinya bila melakukan perilaku bernilai. *Keenam*,

melatih peserta didik dalam keterampilan sosial seperti mengelola konflik dan mengembangkan relasi pribadi yang positif dan berpikir positif tentang orang lain. *Ketujuh*, mengajak, melatih, dan membiasakan para peserta didik untuk selalu bertanggungjawab atas tindakan dan perkataan dan selalu hidup sesuai dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. *Kedelapan*, mengadakan seminar, *talk-show* secara berkala berkaitan dengan pembudayaan dan kesadaran akan nilai-nilai hidup yang menjadi kompas menuju kebaikan, perisai untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi informasi, baik elektronik maupun nonelektronik.

Bibliography

- Budiman, Hikmat. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Karja I (Pendidikan)*. Jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1962.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The McMilan Company, 1964.
- Mead, Margaret. "Anthropology and Education for The Future." *Reading in Anthropology*. ed. J.D. Jennings & E.A. Hoebel. New York: McGraw-Hill, 1996.
- Morin, Edgar. *Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Pai, Young. *Cultural Foundations of Education*. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company, 1990.
- Piliang, Yasraf Amir. *Sebuah Dunia Yang Dilipat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Power, Edward J. *Philosophy of Education*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Clifft, 1982.
- Purwadi, Y. Slamet, et.al. *Pendidikan Nilai Pancasila*. Bandung: Unpar Press, 2007.
- Samho, Bartolomeus. *Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Tantangan dan Relevansi*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- _____. "Bab Penutup." *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Andreas Doweng Bolo, et.al. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Tauhid, Muchammad. *Perjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1963.

Endnotes:

- 1 M. Mead, "Anthropology and Education for The Future," *Reading in Anthropology*, ed. J.D. Jennings & E.A. Hoebel (New York: McGraw-Hill, 1996) 3-5.
- 2 Young Pai, *Cultural Foundations of Education* (Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company, 1990) 150.
- 3 Filsafat Pendidikan idealism memandang para peserta didik bebas untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sementara para pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi pendidikan yang nyaman. Untuk mewujudkan tujuan itu, metode yang diterapkan adalah dialektika. Meskipun demikian, filsafat pendidikan idealisme tetap terbuka pada metode lain yang efektif untuk membentuk karakter positif para peserta didik. Dalam praksisnya, filsafat pendidikan idealism menerapkan kurikulum liberal untuk pengembangan kemampuan rasional para peserta didik dan pendidikan praktis untuk menyiasati kehidupan agar mereka mendapatkan pekerjaan. Lih. Edward J Power, *Philosophy of Education* (New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Clifft, 1982) 189.
- 4 Dalam konteks filsafat pendidikan realisme, kedudukan siswa dalam pendidikan adalah menguasai pengetahuan dengan handal, dapat dipercaya. Peran guru adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan tegas menuntut prestasi para peserta didiknya. Kurikulumnya adalah komprehensif, yakni mencakup semua pengetahuan yang berguna; berisi pengetahuan liberal dan praktis. Metode pembelajaran adalah bergantung pada pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung, yang disampaikan secara logis dan psikologis. Lih. *loc.cit.*
- 5 *Loc.cit.*
- 6 John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The McMilan Company, 1964) 22.
- 7 Menurut Whitehead ada tiga tahap proses belajar manusia dan perkembangan intelektualnya, yakni tahap romantic (tahap dimana anak dirunding rasa ingin tahu akan segala sesuatu yang ditampak pada kecenderungannya untuk bertanya.), tahap ketepatan (berupa tahap belajar tata bahasa, prinsip, hokum, sains, dan kronologi peristiwa yang berguna untuk menjawab dan menjelaskan tahap pertama), tahap generalisasi (penguasaan ilmu dalam arti yang luas). Lih. M. Sastrapratedja, SJ., *Pendidikan Sebagai Humanisasi* (Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013) 24-25.
- 8 Prof. Dr. Nursid Sumaatmadja, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi* (Bandung, Alfabeta, 2002) 44-65.
- 9 Data Kementerian Dalam Negeri pada 2012 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Kasus radikalisme meningkat hampir 80 persen dari tahun sebelumnya. Kemendagri mencatat pada tahun 2012, telah terjadi 128 konflik di Indonesia akibat paham radikalisme. Pada tahun 2010, tercatat 93 konflik dan 2011 sebanyak 77 konflik (<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/15/2004574/Aksi.Kekerasan.di.Indonesia.Meningkat> [access 16.11.2014]). Sementara Komnas perempuan mencatat sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah itu meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada 2003, kasus meningkat 66% menjadi 7.787 kasus, lalu 2004 meningkat 56% (14.020) dan 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada 2006 penambahan diperkirakan 70%. Mitra Perempuan mencatat perempuan yang mengalami kekerasan psikis menduduki urutan pertama kekerasan dalam rumah tangga. Urutan selanjutnya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 63,99 persen, perempuan yang ditelantarkan ekonominya sebanyak 63,69 persen, kekerasan seksual sebanyak 30,95 persen (<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/mutiara-arsip/651-kdrt-banyak>

- terjadi-di-sekitar-kita.html [access 16.11.2014]).
- 10 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama kurun waktu 2003-2013, sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 miliar telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://kampus.okezone.com/read/2013/12/08/373/909104/icw-korupsi-pendidikan-capai-rp619-0-m-di-2003-2013>) [access 16.11.2014]. Lainnya, sepanjang tahun 2012, ICW mencatat terdapat 52 kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah itu, kader partai terbanyak yang terilit kasus korupsi berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 14 orang. Peringkat selanjutnya adalah Partai Demokrat sebanyak 10 kader, PDIP dan PAN masing-masing 8 kader, PKB 4 kader, PKS 2 kader, Gerindra 3 kader, PPP 2 kader dan tidak teridentifikasi satu orang (<http://www.soalcpns.com/data/icw-mengenai-korupsi-tahun-2012.html>) [access 16.11.2014]).
 - 11 Walhi mencatat, persentase tertinggi perusakan lingkungan hidup sepanjang tahun 2012 adalah Perusahaan (sektor tambang dan perkebunan) yang mencapai 39,4%. Lainnya adalah pemerintah 11,3%, kombinasi perusahaan dan pemerintah 28,6 %, masyarakat 2,6 %, kombinasi 18,3 %. Pemberian izin alih fungsi hutan sebesar 30 juta hektar per juni 2012 disinyalir menjadi akar persoalannya. Kebijakan itu mempermudah ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang, antara lain, di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (<http://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/>) [access 16.11.2014]).
 - 12 Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Dilipat* (Bandung: Mizan, 1998) 103.
 - 13 Edgar Morin, *Tujuh Materi Penting bagi Dunia Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005) 41-43.
 - 14 Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) 86.
 - 15 *Ibid.*, 58.
 - 16 Y. Slamet Purwadi, et.al., *Pendidikan Nilai Pancasila* (Bandung: Unpar Press, 2007) 53-58.
 - 17 Ki Hadjar Dewantara, *Karja I (Pendidikan)* (Jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1962) 14-15.
 - 18 *Ibid.*, 25.
 - 19 *Ibid.*, 4, 25.
 - 20 Bartolomeus Samho, "Bab Penutup," *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Andreas Doweng Bolo, et.al. (Yogyakarta: Kanisius, 2012) 270.
 - 21 Soekarno, *Tjampkan Pantjasila* (Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantjasila, 1964) 29-30.
 - 22 Dewantara, *op. cit.*, 13.
 - 23 *Ibid.*, 48.
 - 24 Muchammad Tauhid, *Perjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hadjar Dewantara* (Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1963) 36-37.
 - 25 Dewantara, *op. cit.*, 14.